

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dan ingin dicapai pada tahun 2030. SDGs merupakan agenda pembangunan yang mendorong perubahan bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup> Terdapat lima dimensi dalam SDGs yang dikenal dengan 5P, yakni *people*, *planet*, *prosperity*, *peace*, dan *partnership*.<sup>2</sup> Dimensi-dimensi tersebut kemudian berkembang menjadi 17 tujuan dengan 169 indikator.<sup>3</sup> Salah satu tujuan dari SDGs ialah kesetaraan gender yang tercantum pada Tujuan Lima.

Kesetaraan gender menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, sebab United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa prinsip utama pembangunan manusia ialah memastikan manusia, baik perempuan maupun laki-laki memiliki pilihan dalam hidupnya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga.<sup>4</sup> Gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda. Gender mengacu pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, aktivitas, serta peluang yang didapatkan.<sup>5</sup> Sedangkan jenis kelamin mengacu pada aspek dan

---

<sup>1</sup> Natasya Fila Rais, "The Implementation Of Sustainable Development Goals To Stop Marital Rape In Indonesia" 162, no. Iclj 2017 (2018): 14.

<sup>2</sup> UNDP. Sustainable Development Goals. 2015. Diakses pada 19 November 2021, dari <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>

<sup>3</sup> UNDP. Sustainable Development Goals. 2015.

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020* (Jakarta, 2020).

<sup>5</sup> Mary Manandhar et al., "Gender , Health and the 2030 Agenda for Sustainable Development," no. June (2018): 644–653.

fungsi biologis dari seseorang. Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial. Kesetaraan gender kemudian didefinisikan sebagai pengalokasian sumber daya, kebijakan, dan pengambilan keputusan secara adil bagi perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi jenis kelamin.<sup>6</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung dan berpartisipasi dalam agenda pembangunan dunia. Partisipasi Indonesia dalam agenda pembangunan dunia sudah terlihat sejak adanya Millennium Development Goals (MDGs) yang menjadi agenda pembangunan dunia pertama. Dalam upaya pencapaian SDGs tahun 2030, Indonesia mengadopsi SDGs ke dalam rancangan pembangunan nasional yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB memiliki empat pilar, yakni Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola.<sup>7</sup> Tujuan untuk mencapai kesetaraan gender terdapat dalam Pilar Pembangunan Sosial.

Tujuan kesetaraan gender dalam TPB memiliki delapan target dan 12 indikator.<sup>8</sup> Target 5.5 dalam tujuan kesetaraan gender menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.<sup>9</sup> Pada indikator pertama target ke 5 dari tujuan kesetaraan gender menyebutkan bahwa perempuan memiliki proporsi kursi dalam parlemen baik di

---

<sup>6</sup> Sudershan Kumar Pathania, "Sustainable Development Goal : Gender Equality For Women ' S Empowerment And Human Rights," *International Journal Of Research -Granthaalayah* 5, no. 4 (2017): 72–82, <http://dx.doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i4.2017.1797>.

<sup>7</sup> Bappenas, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goalls (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial, Edisi II*, 2020.

<sup>8</sup> Bappenas, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goalls (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial, Edisi II*.

<sup>9</sup> Bappenas, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goalls (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial, Edisi II*.

(a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.<sup>10</sup> Kata “Parlemen” berasal dari bahasa Latin “parliamentum” yang berarti tempat atau badan yang di mana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi rakyat.<sup>11</sup>

Kehadiran perempuan dalam lembaga dan pengambilan keputusan masih sangat rendah. Pada tahun 2015, Bank Dunia memperkirakan bahwa secara global, perempuan hanya menduduki 22,9% kursi di parlemen nasional.<sup>12</sup> Rendahnya angka ini dipengaruhi oleh tingginya angka kesenjangan gender di berbagai negara terutama negara berkembang. Berdasarkan laporan *Global Gender Gap Report* 2020 yang dikeluarkan pada tahun 2019, posisi kesenjangan gender Indonesia berada di peringkat 85 dari 154 negara. Sedangkan untuk partisipasi perempuan dalam politik, Indonesia berada di peringkat 92 dari 154 negara. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesetaraan gender Indonesia dalam skala global, sehingga isu gender menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam kebijakan nasional.

Gender menjadi isu multidimensi dan tercantum hampir di seluruh kebijakan pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan beberapa indikator di antaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

---

<sup>10</sup> Bappenas, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial, Edisi II*.

<sup>11</sup> Muchammad Ali Syafa'at. *Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010).

<sup>12</sup> Sarah Smith, “Introducing Feminism in International Relations Theory,” *E-International Relations* 1, no. 1 (2018): 1–5, <https://www.e-ir.info/2018/01/04/feminism-in-international-relations-theory/>.

Pemberdayaan Gender (IDG). IPG digunakan untuk melihat perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sedangkan IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik, dan manajerial.<sup>13</sup>

IDG Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari ketiga sumber pengukuran IDG, kontribusi terbesar dalam pertumbuhan pemberdayaan gender pada tahun 2019 ialah meningkatnya indikator keterlibatan perempuan di parlemen.<sup>14</sup> Keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan 3,2% dari tahun 2018, sedangkan indikator lainnya hanya meningkat sebesar 0,4%.

Tabel 1.1. Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2016-2020 (dalam Persentase)

Tahun	Wilayah	IDG	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Kerja Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan
2016	Indonesia	71,39	17,32	47,59	36,42
	Sumatera Barat	69,07	11	58,17	37,29
2017	Indonesia	71,74	17,32	46,31	36,62
	Sumatera Barat	65,01	11	57,54	37,40
2018	Indonesia	72,1	17,2	47,02	36,7
	Sumatera Barat	65,70	11	55,98	37,48
2019	Indonesia	75,24	20,52	47,46	37,1
	Sumatera Barat	59,09	4,62	55,36	37,51
2020	Indonesia	75,57	20,52	48,76	37,26
	Sumatera Barat	58,28	4,62	58,97	37,57

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

Peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen secara nasional tidak sejalan dengan tingkat keterlibatan perempuan di parlemen di daerah. Pada tahun

<sup>13</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*.

<sup>14</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*.

2019, terdapat tiga provinsi dengan IDG terendah yaitu Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat.<sup>15</sup> Beberapa alasan yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen ialah kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mendorong perempuan terlibat dalam aktivitas politik, rendahnya minat perempuan untuk beraktivitas di bidang politik, serta kurangnya pengalaman perempuan di ranah publik.<sup>16</sup> Kurangnya partisipasi perempuan di ranah publik disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Indonesia.<sup>17</sup> Budaya patriarki mengkonstruksi pemahaman bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga, sehingga perempuan dianggap tidak perlu ikut dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan kehidupan.<sup>18</sup>

Sumatera Barat dengan sukunya Minangkabau, merupakan daerah yang menganut sistem matrilineal.<sup>19</sup> A.A Navis mengatakan bahwa sistem matrilineal dapat mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam masyarakat Minang.<sup>20</sup> Adanya kepemimpinan Bundo Kanduang dalam Rumah Gadang dan kepemilikan harta warisan diturunkan kepada perempuan, menunjukkan adanya peluang bagi perempuan untuk memiliki potensi dan peran yang adil dalam berbagai bidang termasuk politik.<sup>21</sup> Namun hal tersebut tidak membuat perempuan di Sumatera

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2019-2020. Diakses pada 21 Februari 2022 dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

<sup>16</sup> Edward Aspinall, "Women ' s Political Representation in Indonesia : Who Wins and How ?," *Journal of Current* 40, no. 1 (2021): 3–27.

<sup>17</sup> Kunthi Tridewiyanti, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik 'Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,'" *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.

<sup>18</sup> Tridewiyanti, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik 'Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.'"

<sup>19</sup> Nurwani Idris, "Perempuan Minangkabau Dalam Politik," *Humaniora* 22, no. 2 (2010): 164–175.

<sup>20</sup> Lidya Victorya Pandiangan, "Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik," *Jurnal Politik Muda* 6, no. 2 (2017): 148–155.

<sup>21</sup> Putiviola Elian Nasir et al., "Minangkabau Matriliney and Gender Equality : Cultural Contribution to Sustainable Development Goals Minangkabau Matriliney and Gender Equality : Cultural Contribution to Sustainable Development Goals," *Andalas Journal of International Studies* X, no. 1 (2021): 16–33.

Barat dapat terlibat aktif di kegiatan politik. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya angka keterlibatan perempuan di parlemen provinsi khususnya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di mana dari 65 kursi anggota DPRD, hanya tiga kursi yang diduduki oleh perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya angka keterlibatan perempuan di parlemen provinsi khususnya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di mana dari 65 kursi anggota DPRD, hanya tiga kursi yang diduduki oleh perempuan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa perempuan memiliki kuota 30% dari total keterwakilan di parlemen tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota.<sup>22</sup> Keterwakilan perempuan di parlemen provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator pemberdayaan gender yang dikemukakan oleh Kabeer, pemberdayaan gender di Sumatera Barat sudah memiliki cukup *resources*.<sup>23</sup> Selain konstitusi, nilai-nilai dalam budaya matrilineal yang seharusnya menjadi keunggulan bagi Sumatera Barat untuk mendorong pemberdayaan perempuan ternyata belum terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait apa hambatan yang dihadapi pemerintah Sumatera Barat

---

<sup>22</sup> Ignatius Mulyono. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan." (DPR, 2010). [https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah\\_Strategi\\_Meningkatkan\\_Keterwakilan\\_Perempuan\\_Oleh-Ignatius\\_Mulyono.pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_Strategi_Meningkatkan_Keterwakilan_Perempuan_Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf)

<sup>23</sup> Naila Kabeer and Palais Nations, "The Conditions and Consequences of Choice : Reflections on the Measurement of Women ' s Empowerment f or Social Development," no. 108 (1999).

dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen tingkat provinsi pada tahun 2019.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Meningkatnya IDG Indonesia secara nasional pada tahun 2019 tidak sejalan dengan peningkatan IDG di daerah. Sumatera Barat menjadi salah provinsi dengan tingkat IDG terendah pada tahun tersebut. Dengan masyarakatnya yang menganut sistem matrilineal, hal ini seharusnya menjadi keunggulan bagi Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan di daerahnya. Namun angka IDG Sumatera Barat berada jauh di bawah angka IDG nasional. Angka IDG terkecil di Sumatera Barat terletak pada indikator keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya partisipasi perempuan dapat dilihat dari sedikitnya jumlah anggota perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Penurunan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen ini menjadi hal yang perlu diteliti untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Sumatera Barat dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen, sebab hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pemberdayaan perempuan di Sumatera Barat yang mampu mendukung tercapainya SDGs pada tahun 2030.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut “Apa hambatan yang dihadapi Sumatera Barat dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen tingkat provinsi pada tahun 2019-2022?”

#### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Sumatera Barat dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen tingkat provinsi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen dalam kerangka agenda mendorong tercapainya SDGs.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi literatur terkait implementasi SDGs tujuan kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas untuk memahami lebih baik alasan rendahnya pemberdayaan perempuan di Sumatera Barat khususnya pada partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen Sumatera Barat beserta hambatan yang dihadapi dalam mendukung tercapainya SDGs tujuan kesetaraan gender.

#### 1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, dilakukan beberapa tinjauan pustaka berupa artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Artikel ilmiah ini akan dijadikan landasan kerangka berpikir dan acuan mengenai topik yang dibahas. Tinjauan pustaka pertama berasal dari artikel yang ditulis oleh Nurwani Idris dengan judul “Perempuan Minangkabau Dalam Politik”. Artikel ini menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan Minangkabau dalam

berpartisipasi di bidang politik dengan fokus utama pada aspek-aspek politik dan agama yang dihubungkan dengan faktor diri (*self*) perempuan itu sendiri.<sup>24</sup>

Artikel ini berkontribusi untuk membantu penulis memahami hambatan yang dihadapi perempuan di Sumatera Barat secara eksternal dan internal. Hambatan eksternal bersumber dari struktural, budaya, dan agama. Sedangkan hambatan internal berasal dari dalam diri perempuan sendiri. Perbedaan antara tinjauan pustaka pertama dengan penelitian yang akan dibuat terletak pada fokusnya. Artikel pertama ini membahas partisipasi perempuan Minangkabau dalam politik secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada hambatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Tinjauan pustaka kedua ialah artikel yang ditulis oleh Muhammad Syukri dengan judul “Politik Gender di Minangkabau”. Artikel ini membahas tentang bagaimana relasi gender berpengaruh terhadap institusi, kepentingan, dan gagasan. Artikel ini berfokus pada isu pengarusutamaan gender yang mulai menjadi landasan pembangunan nasional sejak tahun 2000 dan bagaimana kebijakan tersebut berlaku di wilayah dengan budaya matriarki. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa rendahnya IDG Sumatera Barat membuat perempuan masih berada di posisi yang rentan, hal ini menyebabkan masih tingginya kasus ketidaksetaraan gender di Sumatera Barat yang salah satunya kekerasan terhadap perempuan.<sup>25</sup>

Kontribusi yang didapatkan melalui artikel ini ialah pemahaman tentang bagaimana masyarakat Minangkabau memahami konsep gender. Dijelaskan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu kesetaraan gender dan apa dampaknya

---

<sup>24</sup> Idris, “Perempuan Minangkabau Dalam Politik.”

<sup>25</sup> Muhammad Syukri, “Politik Gender Di Ranah Minang: Institusi, Gagasan Dan Kepentingan,” *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 1 (2013): 39–53.

menyebabkan sulitnya pencapaian kesetaraan gender di Sumatera Barat. Artikel ini menggunakan konsep Politik Ekonomi 3I (*Institutions, Interests, Ideas*) dari Rosendorff untuk melihat sejauh mana pengarusutamaan gender berjalan di Sumatera Barat, hal ini yang akan menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan konsep pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer untuk melihat hambatan yang dihadapi perempuan Sumatera Barat untuk berpartisipasi di parlemen.

Tinjauan pustaka selanjutnya berjudul “Minangkabau Matriliney and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals” yang ditulis oleh Putiviola Elian Nasir, dkk. Artikel ini membahas tentang sejauh mana kontribusi sistem matrilineal di Minangkabau terhadap pembangunan daerah di Sumatera Barat khususnya pada target kesetaraan gender dalam TPB.<sup>26</sup> Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam matrilineal sebenarnya mampu memberikan kontribusi positif untuk mendukung kesetaraan gender. Namun masih besarnya dominasi laki-laki dalam berbagai bidang pada masyarakat ini, menjadi tantangan bagi Sumatera Barat untuk mencapai kesetaraan gender seperti yang dicita-citakan dalam TPB.

Artikel ini berkontribusi untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pengaruh nilai-nilai matrilineal dalam pencapaian TPB tujuan kesetaraan gender. Namun perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lingkup pembahasan. Artikel ini membahas indikator TPB tujuan kesetaraan

---

<sup>26</sup> Nasir dkk., “Minangkabau Matriliney and Gender Equality : Cultural Contribution to Sustainable Development Goals Minangkabau Matriliney and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals.”

gender secara keseluruhan, namun pada penelitian ini hanya difokuskan pada indikator keterwakilan perempuan di parlemen saja.

Tinjauan pustaka selanjutnya ditulis oleh Maimunah Ismail, dkk. dengan judul “Gender Empowerment Measure in Political Achievement in Selected Developed and Developing Countries.” Artikel ini membahas tentang perbandingan pemberdayaan perempuan di bidang politik di negara maju dan negara berkembang. Hasil yang ditemukan dalam artikel ini ialah pada negara-negara yang sudah lebih dulu memberikan hak politik kepada perempuan, menunjukkan tingginya angka partisipasi perempuan pada perpolitikan negara tersebut.<sup>27</sup> Hal ini membentuk budaya egaliter pada masyarakatnya, yaitu budaya yang menganggap bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama. Baik di negara maju dan di negara berkembang, keadaan sosial-budaya serta sikap perempuan menjadi faktor utama yang dapat mendorong atau menghambat pemberdayaan perempuan.

Artikel ini berkontribusi untuk memberikan pemahaman kepada penulis terkait faktor pendukung dan faktor hambatan dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik di negara maju dan berkembang. Namun perbedaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada unit analisis yang dipilih. Artikel ini memilih negara maju dan negara berkembang sebagai unit analisisnya, sedangkan penelitian ini mengambil lingkup yang lebih kecil yaitu daerah Sumatera Barat sebagai unit analisisnya.

---

<sup>27</sup> Maimunah Ismail, Roziah Mohd Rasdi, and Akhmal Nadirah Abd Jamal, “Gender Empowerment Measure in Political Achievement in Selected Developed and Developing Countries,” *Gender in Management* 26, no. 5 (2011): 380–392.

Tinjauan Pustaka kelima dalam penelitian ini ialah artikel dengan judul “Women/Gender Development: the Growing Gap Between Theory and Practice” yang ditulis oleh Jane S. Jaquette. Artikel ini membahas tentang evolusi isu perempuan dalam pembangunan. Dalam artikel ini dijelaskan terkait awal mula perempuan menjadi perbincangan di dalam pembangunan internasional yang kemudian dikaitkan dengan teori feminisme, postkolonialisme, dan poststrukturalisme. Hasil dari artikel menyebutkan bahwa masih adanya perbedaan dalam praktik pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh para cendekiawan dan feminis. Oleh sebab itu, Jaquette menyarankan perlunya peran ahli dalam pembuatan kebijakan sehingga harapan dan visi misi dalam pembangunan berbasis gender dapat terlaksana secara efektif, agar perempuan dapat memperluas pilihan mereka, dan dapat meningkatkan agensi mereka.<sup>28</sup>

Artikel ini membantu penulis untuk memahami tentang bagaimana isu perempuan dan pembangunan dibahas dalam Ilmu Hubungan Internasional dan bagaimana praktik yang dijalankan. Selain itu, artikel ini juga membantu penulis untuk memahami apa yang menjadi latar belakang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan serta apa saja hambatan yang masih terjadi dalam mendorong partisipasi perempuan. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada indikator yang dipilih. Artikel ini membicarakan tentang perempuan dalam segala aspek pembangunan, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada keterwakilan perempuan di parlemen.

---

<sup>28</sup> Jane S. Jaquette, “Women/Gender and Development: The Growing Gap Between Theory and Practice,” *Studies in Comparative International Development* 52, no. 2 (2017): 242–260.

## 1.7. Kerangka Pemikiran

### 1.7.1. Pemberdayaan Perempuan

Pada tahun 1960an, Pembangunan internasional berfokus pada mengurangi kemiskinan di dunia melalui pertumbuhan ekonomi dan pendekatan “Trickle-Down”. Namun pada tahun 1970an, hasil pendekatan “Trickle-Down” menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini membuat para aktivis perempuan dan ahli kajian tentang perempuan mengatakan bahwa dibutuhkan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Sejak saat itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi integrasi pembangunan berperspektif gender.<sup>29</sup>

Dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI), feminisme memperkenalkan gender sebagai suatu alat teoritis untuk menganalisis hubungan kekuatan global dan membangun tatanan dunia alternatif.<sup>30</sup> Feminisme menjadi teori dalam Ilmu HI pada akhir tahun 1980an.<sup>31</sup> Teori ini berkembang pada era pasca-Perang Dingin bersama dengan perspektif lain seperti post-modernisme, konstruktivisme, dan teori kritis yang membuat kajian Ilmu HI mulai berfokus pada manusia.<sup>32</sup>

Tickner merupakan salah satu tokoh feminis yang menggambarkan bahwa teori realis berfokus pada laki-laki dan pengucilan perempuan. Feminisme menentang perspektif tradisional yang menempatkan laki-laki secara eksklusif dalam bidang politik tinggi (*high politic*) seperti kedaulatan, keamanan negara, dan

---

<sup>29</sup> Mia Siscawati et al., “Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia,” *Journal of Strategic and Global Studies* 2, no. 2 (2020).

<sup>30</sup> Gülşen Aydın, “Feminist Challenge to the Mainstream IR,” *European Journal of Multidisciplinary Studies* 2, no. 1 (2016): 62.

<sup>31</sup> J. Tickner, “Feminist Perspectives on International Relations,” *Handbook of International Relations* (2012): 275–292.

<sup>32</sup> Aydın, “Feminist Challenge to the Mainstream IR.”

militar.<sup>33</sup> Lorraine Code mengatakan bahwa patriarki mensubordinasikan perempuan baik status, maupun kekuatannya, yang berdasar pada kepercayaan “benar dan pantas bagi laki-laki untuk memerintah dan perempuan untuk menaati”.<sup>34</sup>

Teori feminisme menyoroti banyak masalah yang terkait dengan partisipasi perempuan dan peran mereka dalam kehidupan publik secara umum dan hubungan internasional secara khusus. Sebagai bagian dari teori post-positivis, teori ini berfokus pada peran budaya, nilai-nilai dan aturan yang mengatur individu.<sup>35</sup> Dalam hal ini, feminis menyebutkan bahwa gender merupakan hasil konstruksi sosial yang perilakunya dibedakan menjadi dua yaitu maskulin dan feminin. Maskulinitas erat kaitannya dengan rasionalitas, kekuasaan, kemandirian, dan ruang publik. Konstruksi sosial mengatakan maskulinitas dimiliki oleh laki-laki sehingga mereka dijadikan pemimpin dalam keluarga dan komunitas. Di sisi lain, feminitas dikaitkan dengan irrasionalitas, membutuhkan perlindungan, domestikitas, dan ruang privat. Hal ini yang membuat perempuan dijadikan sebagai subordinat dan pendukung.<sup>36</sup>

Pada tahun 1970an, para feminis liberal mengupayakan agar perempuan terlihat dalam proses pembangunan.<sup>37</sup> Hal ini sejalan dengan fokus gerakan gelombang feminis saat itu yang memperjuangkan hak hukum dan hak sosial yang sama untuk perempuan dan laki-laki. Terdapat empat gelombang gerakan feminis

---

<sup>33</sup> Smith, “Introducing Feminism in International Relations Theory.”

<sup>34</sup> Tricia Ruiz, “Feminist Theory and International Relations: The Feminist Challenge to Realism and Liberalism,” *Soundings Journal* 2, no. November (2004): 1–7, <https://www.csustan.edu/sites/default/files/honors/documents/journals/soundings/Ruiz.pdf>.

<sup>35</sup> Sinan Salah Rashid, “Sinan Salah Rashid, Feminist Theory In International Relations,” *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* 18, no. 4 (2021): 4164–4173.

<sup>36</sup> Smith, “Introducing Feminism in International Relations Theory.”

<sup>37</sup> Tickner, “Feminist Perspectives on International Relations.”

yaitu, gelombang pertama yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20 yang berfokus pada hak perempuan untuk memilih (*women's right to vote*). Gelombang kedua yang terjadi pada tahun 1960an dan 1970an serta gelombang ketiga yang terjadi pada tahun 1990an, yang berfokus pada hak hukum dan sosial yang setara (*equal legal dan social rights*). Gelombang keempat yang terjadi pada tahun 2012 hingga saat ini berfokus pada pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*). Gelombang feminis yang terjadi saat ini mengupayakan penguatan keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan bisnis.<sup>38</sup>

Kata pemberdayaan muncul pertama kali pada abad ke-17 dan memiliki arti seperti otorisasi atau delegasi.<sup>39</sup> Tandon mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses distribusi kekuatan antara perempuan dan laki-laki baik dalam hubungan interpersonal maupun hubungan dalam institusi dan masyarakat.<sup>40</sup> Rappaport juga mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses atau mekanisme di mana orang, organisasi, dan komunitas memperoleh penguasaan atas hidup mereka.<sup>41</sup> Adams dalam bukunya mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses bagaimana individu, kelompok, atau masyarakat dapat mengendalikan keadaan mereka, menjalankan kekuasaan, dan mencapai tujuan mereka baik dengan kekuatan sendiri atau bantuan dari orang demi memaksimalkan kualitas hidup mereka.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Mahbub Mahbub, "Course Name : Gender and Politics in Bangladesh Paper Title : Women Empowerment , Definition , Theory , Process , Practice and Importance- An Analysis Course Director Department of Political Science University of Dhaka Department of Political Science Univ," no. July (2021).

<sup>39</sup> Keshab Chandra Mandel, "Concept and Types of Women Empowerment," *International Forum of Teaching and Studies* 9, no. 2 (2006): 17–30.

<sup>40</sup> Tanu Tandon. "Women Empowerment: Perspectives and Views." *The International Journal of Indian Psychology* 3, no.8 (2016): 5-12.

<sup>41</sup> Julian Rappaport, "Studies in Empowerment: Introduction to the Issue," *Prevention in Human Services* 3, no. 2–3 (1984): 1–7.

<sup>42</sup> Robert Adams. *Empowerment, participation and social work*. (New York: Palgrave Macmillan, 2008).

Pemberdayaan perempuan dikembangkan pada tahun 1970an yang berfokus pada kelompok yang termarginalisasikan dan mendorong mereka agar menjadi aktor penting dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>43</sup> Secara tradisional, perempuan merupakan kelompok yang termarginalisasi. Sejarah menunjukkan bahwa dari semua kelompok miskin di dunia, perempuanlah yang paling menderita.<sup>44</sup> Penderitaan mereka tidak hanya terbatas pada ras, budaya, wilayah, atau agama saja, namun perempuan juga telah menjadi korban pelecehan, penganiayaan, kekerasan, pemerkosaan, kemiskinan, kekurangan gizi, dsb. Oleh sebab itu, sejak berdirinya PBB pada abad ke-20, isu pemberdayaan dan pembangunan perempuan mulai menjadi sorotan dunia.<sup>45</sup>

Sahay menyebutkan bahwa pemberdayaan memungkinkan perempuan menyadari identitas dan kekuatan penuh mereka di semua bidang kehidupan. Mahbub juga mengatakan bahwa pemberdayaan memungkinkan perempuan untuk menyadari identitas, potensi, dan kekuatannya di berbagai aspek kehidupan.<sup>46</sup> Dengan kata lain, pemberdayaan perempuan akan mendorong dan menguatkan perempuan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam sistem internasional, tonggak perkembangan konsep pemberdayaan perempuan ialah Konferensi Beijing 1995. Salah satu ahli yang mengembangkan konsep pemberdayaan perempuan ialah Naila Kabeer. Kabeer mengartikannya

---

<sup>43</sup> Siscawati et al., "Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia."

<sup>44</sup> Mandel, "Concept and Types of Women Empowerment."

<sup>45</sup> Mandel, "Concept and Types of Women Empowerment."

<sup>46</sup> Mahbub, "Course Name : Gender and Politics in Bangladesh Paper Title : Women Empowerment , Definition , Theory , Process , Practice and Importance- An Analysis Course Director Department of Political Science University of Dhaka Department of Political Science Univ."

sebagai re-transformasi relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki sehingga perempuan memiliki kekuasaan lebih besar atas hidup mereka sendiri.<sup>47</sup>

Menurut Kabeer, pemahaman tentang pemberdayaan gender berkaitan erat dengan indikator *resources*, *agency*, dan *achievement*. Kabeer mengasumsikan pemberdayaan perempuan sebagai proses memiliki dan menggunakan *resources* dan *agency* untuk mencapai *achievement* tertentu. Pemberdayaan membuat perempuan mampu untuk membuat agenda dan membuat keputusan. Kekuatan seperti itu tidak dapat diberikan melainkan harus diproduksi oleh perempuan itu sendiri.<sup>48</sup> Kabeer menjelaskan pemikirannya dengan skema yang bisa dilihat pada gambar 1.1.

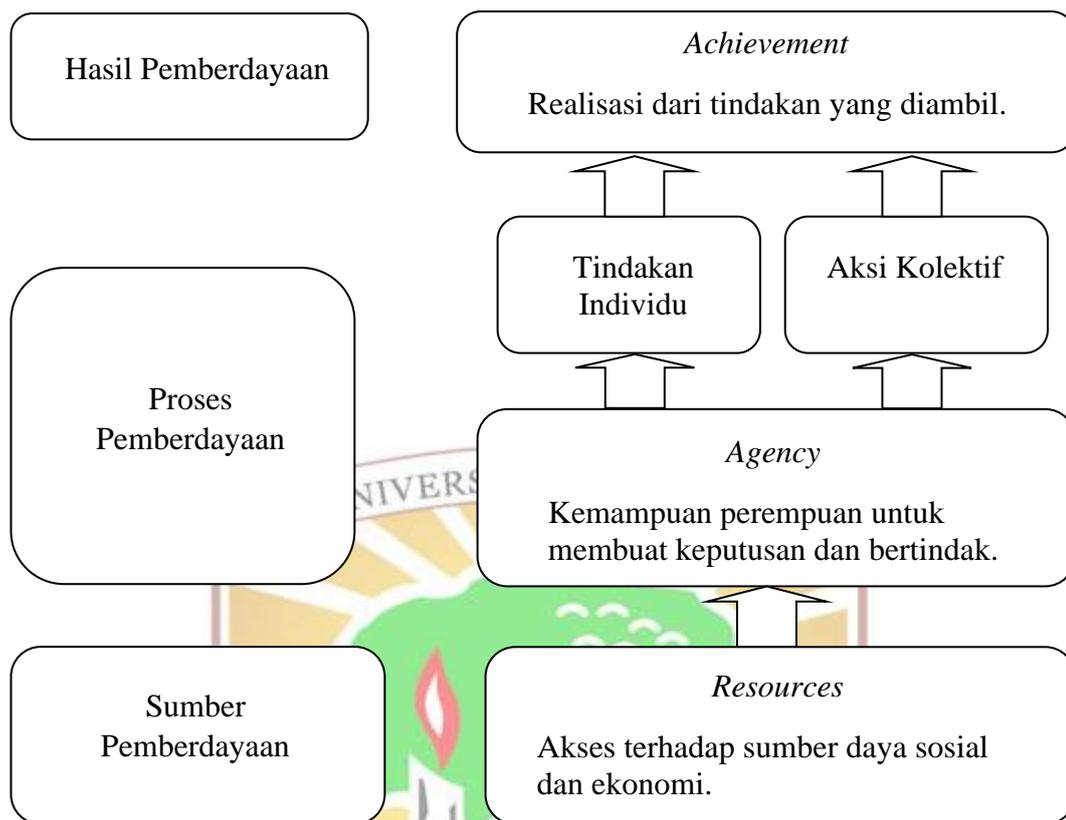
*Resources* atau sumber daya merupakan bagaimana perempuan mendapat akses terhadap sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya sumber daya material dalam pengertian ekonomi yang lebih konvensional, tetapi juga berbagai sumber daya manusia dan sosial yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam membuat pilihan. Sumber daya diperoleh melalui hubungan sosial di berbagai tingkatan masyarakat, dimulai dari yang terkecil seperti keluarga, pasar, dan komunitas. Sumber daya tersebut dapat berupa alokasi aktual serta klaim dan harapan di masa depan. Akses ke sumber daya tersebut akan mencerminkan aturan dan norma yang mengatur sistem dalam masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Siscawati et al., "Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia."

<sup>48</sup> Siscawati et al., "Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia."

<sup>49</sup> Naila Kabeer, "Resources, Agency, Achievements : Reflections on the Measurement of Women's Empowerment" 30, no. May (1999): 435–464.



Sumber: Kabeer, 1999.

Gambar 1.1. Skema Konsep Pemberdayaan Perempuan oleh Naila Kabeer

Sumber daya memberikan sumbangsih yang besar pada persepsi terhadap perempuan. Selama ini, persepsi terhadap peran tertentu seperti kepala rumah tangga, kepala suku, direktur perusahaan, anggota elit dalam suatu komunitas atau otoritas pengambilan keputusan di lembaga-lembaga selalu dikaitkan dengan laki-laki.<sup>50</sup> Marjinalisasi terhadap perempuan membuat perempuan menjadi tidak memiliki pilihan selain menjadi aktor yang mengikuti keputusan, bukan pengambil keputusan.

Sumber daya mencerminkan aturan dan norma yang ada di masyarakat. Aturan dan norma tersebut akan menjadi sumber daya yang dapat “melumpuhkan”

<sup>50</sup> Kabeer, “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment.”

atau “memampukan” perempuan untuk berdaya.<sup>51</sup> Ketersediaan sumber daya menjadi akses utama bagi perempuan untuk mampu menentukan pilihan dan membuat keputusan.

*Agency* mengacu pada proses di mana pilihan dan kemampuan digunakan. *Agency* memiliki dua konotasi, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif.<sup>52</sup> Konotasi positif bermakna “kekuatan untuk”, yang mengacu pada kemampuan perempuan untuk membuat dan bertindak atas pilihan mereka sendiri, bahkan dalam melawan ketidakadilan.<sup>53</sup> Sedangkan konotasi negatif bermakna “kekuasaan atas”, yang mengacu pada kapasitas aktor untuk memaksakan tujuannya terhadap orang lain yang bertentangan dengan keinginan mereka.<sup>54</sup> Dengan kata lain, *agency* ialah rasa mampu untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan atas keputusan tersebut.

Pemberdayaan berakar dari bagaimana perempuan melihat dan menghargai dirinya.<sup>55</sup> Pandangan mereka tentang harga diri tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pemikiran pribadi, melainkan juga bagaimana masyarakat dan lingkungan sosial membentuk persepsi terhadap perempuan. *Resources* dan *agency* berkaitan dengan bagaimana perempuan membentuk sebuah kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka mencapai kehidupan yang bernilai.

---

<sup>51</sup> Kabeer, “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment.”

<sup>52</sup> Kabeer, “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment.”

<sup>53</sup> Naila Kabeer, “Gender Equality and Women’s Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal,” *Gender and Development* 13, no. 1 (2005): 13–24.

<sup>54</sup> Kabeer, “Gender Equality and Women’s Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal.”

<sup>55</sup> Kabeer, “Gender Equality and Women’s Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal.”

*Achievement* kemudian hadir sebagai bentuk realisasi atau hasil dari tindakan yang telah diambil oleh perempuan. Hal ini berkaitan dengan apakah perempuan mampu untuk menggunakan *resources* dan *agency* yang ada untuk merealisasikan pilihan mereka atau justru pilihan tersebut gagal direalisasikan.<sup>56</sup> Dalam dunia politik, *achievement* merupakan tolak ukur pemberdayaan perempuan baik secara kuantitatif yang dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan dan secara kualitatif yang dilihat dari kontribusi perempuan dalam pembuatan kebijakan. Kehadiran perempuan dalam parlemen seharusnya mampu memberi makna dan harapan perubahan pada pembangunan.

Pemikiran Kabeer telah diadopsi oleh PBB sebagai indikator pengukuran pemberdayaan perempuan sejak terbitnya agenda pembangunan dunia pertama, MDGs. Bahkan dua dari tiga indikator yang ada dalam IDG pernah dikemukakan oleh Kabeer, yang salah satunya pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen. Kabeer mengatakan bahwa sebagai setengah bagian dari populasi, perempuan tentu berhak untuk menduduki kursi parlemen. Selain itu, dalam membuat keputusan, hanya perempuanlah yang mampu menyuarakan kebutuhan dan prioritas perempuan lainnya.<sup>57</sup>

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Strauss dan Corbin mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan

---

<sup>56</sup> Kabeer, "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal."

<sup>57</sup> Kabeer, "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal."

prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>58</sup> Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah memberikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan juga akurat mengenai fakta-fakta yang terkait dengan hambatan yang dihadapi pemerintah Sumatera Barat dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen.

### **1.8.2. Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini tidak meluas dari fokus utamanya, maka penulis menetapkan batasan di penelitian ini yaitu pada tahun 2019-2022. Periode waktu ini dipilih karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IDG Sumatera Barat memang selalu menurun dari tahun ke tahun, namun mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2019 terutama pada indikator keterwakilan perempuan di parlemen dan hal itu masih terjadi hingga tahun 2022.

### **1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek kajian yang perilakunya akan diteliti dan dianalisis.<sup>59</sup> Dengan demikian, yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara itu, unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis.<sup>60</sup> Dengan demikian, yang menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini ialah Sumatera Barat.

---

<sup>58</sup> Pamela Maykut and Richard Morehouse, *Beginning Qualitative Research, Beginning Qualitative Research* (London: Taylor & Francis, 2002).

<sup>59</sup> Mochtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi." (Jakarta: LP3ES, 1990).

<sup>60</sup> Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi."

Level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari objek kajian yang akan diteliti atau dianalisis.<sup>61</sup> Tingkat analisis dari penelitian ini ialah kelompok. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini akan menjelaskan apa saja yang menjadi hambatan Sumatera Barat dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen.

#### **1.8.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian kali ini adalah metode wawancara yang akan menjadi data primer dan studi kepustakaan yang akan menjadi data sekunder. Data primer nantinya akan diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah narasumber yang relevan seperti narasumber yang berasal dari DPRD Sumatera Barat selaku aktor yang berperan dalam parlemen daerah, narasumber yang berasal dari organisasi Bundo Kanduang sebagai pemimpin kaum perempuan di dalam adat Minangkabau, serta ahli dalam Perpolitikan dan Budaya Minangkabau. Sementara data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, situs, maupun laporan penelitian yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

#### **1.8.5. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis melakukan analisis data melalui beberapa tahap. Tahapan yang pertama ialah pencarian dan pengelompokan data. Penulis mewawancarai narasumber terkait dan mencari data-data yang relevan dengan topik penelitian seperti penelitian tentang perempuan dan politik di Sumatera Barat, pemberdayaan gender di tingkat global, nasional, dan daerah, yang kemudian data-data tersebut dikelompokkan

---

<sup>61</sup> Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi."

berdasarkan kategori tertentu. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan ialah wawancara tak terstruktur sebagai metode untuk mendapatkan informasi secara mendalam.

Tahapan kedua yang dilakukan ialah menyeleksi data-data yang sudah dikumpulkan dan dikategorikan. Setelah data-data yang ada dibaca, penulis menyeleksi data mana saja yang bisa berkontribusi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mana data yang tidak relevan untuk penelitian ini. Selanjutnya dilakukan interpretasi atau penyajian data. Interpretasi data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang relevan dan kemudian dilakukan analisis data menggunakan metode triangulasi data. Di mana pada penelitian ini akan digunakan pendekatan triangulasi sumber yang berarti menguji data yang didapatkan dari berbagai sumber informan. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Penyajian data ini akan terlihat pada Bab I hingga Bab IV.

Dalam melakukan analisis data, penulis juga akan mengaitkan konsep *resources*, *agency*, dan *achievement* yang dikemukakan oleh Kabeer sesuai dengan data yang sudah dikelompokkan. Data tersebut dijelaskan menggunakan konsep *resources* dan *agency* sebagai pembentuk sebuah kemampuan dalam proses pemberdayaan. Kemudian konsep *achievement* akan membantu dalam menjelaskan apakah nilai dan budaya yang berkembang di Sumatera Barat sudah memenuhi kualifikasi *resources* dan *agency* sehingga mampu merealisasikan pemberdayaan perempuan dalam kerangka SDGs dengan baik atau tidak. Dari analisis ini akan terlihat indikator mana yang menjadi masalah sehingga terhambatnya partisipasi perempuan di parlemen Sumatera Barat. Terakhir, pengambilan kesimpulan akan ditarik berdasarkan analisis yang sudah dilakukan.

## **1.9. Sistematika Kepenulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB II : Implementasi SDGs Tujuan Kesetaraan Gender di Sumatera Barat**

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana SDGs tujuan kesetaraan gender diimplementasikan di Sumatera Barat.

### **BAB III : Politik dan Pemberdayaan Perempuan di Sumatera Barat**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana sejarah pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik di wilayah Sumatera Barat.

### **BAB IV : Hambatan Yang Dihadapi Sumatera Barat Dalam Mendorong Partisipasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen**

Bab ini akan menjelaskan apa saja yang menjadi hambatan bagi pemerintah Sumatera Barat dalam mendorong partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen pada tahun 2019.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan penelitian.

